

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang Masalah

Penelitian ini adalah studi semiotika representasi kekerasan masyarakat di Papua dalam fotografi berjudul *Puzzle of Violence* karya Albertus Vembrianto Waluya. Penelitian ini akan menggunakan metodologi semiotika model Charles Sanders Peirce. Peneliti akan menelusuri bagaimana kekerasan di Papua ditampilkan oleh Albertus Vembrianto lewat esai foto jurnalistiknya.

Sejak masa pemerintahan Orde Baru, status keamanan Papua tak pernah lepas dari ‘Zona Merah’ atau daerah rawan konflik. Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) masih langgeng terjadi hingga hari ini. Aksi represif Negara lewat berbagai instrumennya—Polisi dan Militer—digunakan untuk menekan ekspresi politik masyarakat Papua terkait ketidakpuasan mereka yang di-anak tiri-kan oleh Negara. Baik disektor kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, hingga di sektor pembangunan fasilitas publik. (Elhasam, 5 : 2015)

Berdasarkan informasi yang dihimpun oleh peneliti, berbagai kasus pelanggaran HAM di Papua yang terjadi dalam kurun waktu mulai tahun 1965 hingga – 2020, nyaris tak ada satupun yang terselesaikan. Mulai penembakan militer terhadap sipil, pembantaian massal masyarakat Biak Berdarah (1998), represi terhadap masyarakat di kabupaten Nduga pada 2018 hingga hari ini, juga masih belum menemui titik terang. Menurut peneliti, itu adalah bara yang dipelihara masyarakat Papua. (Elhasam, 5 : 2015)

Selain itu, menurut laporan Human Right Watch (HRW) salah satu faktor yang pelanggaran hukum masih terus tumbuh subur di Papua, adalah minimnya akses pewartanya yang meliput tentang kekerasan di Papua. Bahkan, masyarakat media Papua sendiri seperti *Suara Papua* dan *Jubi* juga dibredel dan diretas oleh Negara. Ada sekitar 107 wartawan, redaktur, penerbit, dan akademisi yang dicabut aksesnya berdasarkan Instruksi Presiden (Inpres) Jokowi yang diterbitkan tahun 2015. Mayoritas dari mereka yang dibatasi aksesnya adalah mereka yang pernah memberitakan, menuliskan, dan meneliti tentang kekerasan dan intimidasi yang dilakukan oleh Negara terhadap Orang Asli Papua (OAP). (Human Right Watch, 6 : 2015)

Pembatasan akses yang terkesan tebang pilih terhadap pewartanya mengenai isu Papua, turut mengkonstruksi stigma masyarakat terhadap Orang Asli Papua lewat berita yang diterbitkan oleh media arus utama. Salah satu contohnya adalah TvOne. Lewat jurnal berjudul *Konstruksi Berita Penggerebekan Asrama Papua di Surabaya* yang ditulis oleh Dwi Devita & Muhammad Gafar Yoedtadi, TvOne terkesan tindak represi yang dilakukan oleh Organisasi Masyarakat (Ormas) dan Aparatus Negara adalah sesuatu yang wajar. Kata kunci ‘makar’ dan ‘separatis’ yang diucapkan dan dituliskan secara repetitif, digunakan untuk membangun sentimen dan memperkokoh legitimasi anti-nasionalisme yang dilekatkan kepada masyarakat Papua. (Devita & Yoedtadi, 396 : 2019)

Berdasarkan narasi yang dibangun oleh media arus utama, masyarakat Papua kerap distigmatisasi sebagai kelompok pemberontak dan biang onar.

Sekaligus, kesan masyarakat Papua sebagai kelompok yang tertinggal dan primordial juga dipertebal oleh pernyataan politis di komentar mereka saat diwawancara jurnalis, ataupun di pidato kampanye mereka. Selain media, di sini politisi juga berperan aktif untuk mengkonstruksi imajinasi masyarakat tentang Papua sebagai wilayah berbahaya, yang masyarakatnya primitif dan terbelakang. Menurut Wisnu Prasetyo, seorang pengamat media Indonesia, mengatakan berita yang bertendensi rasis dapat membuat publik terpengaruh dan menjadikan berita sebagai legitimasi untuk melakukan aksi-aksi kekerasan. Selain itu, media arus utama juga tidak memberi banyak ruang dalam pemberitaan kekerasan dan pelanggaran HAM di Papua. Narasi tentang Papua di dominasi dengan berita tentang pembangunan dan aksi anarkis yang dilakukan oleh masyarakat Papua. (Prabowo & Apinio, 2019, Tirto.id)

Gesekan antara dua kelompok masyarakat tersebut, jika ditilik dari teori Identitas Sosial milik Henri Tajfel dan John C. Turner, karena adanya stereotip yang melekat sebagai identitas diantara dua kelompok tersebut. Karena, setiap kelompok memiliki keyakinan dan evaluasi atas sebuah nilai. Evaluasi di sini dimaksud ketika kondisi stigma menjadikan seseorang mengalami perubahan status dari 'normal' menjadi 'marjinal'. (Huda, 33 : 2014)

Karena minimnya berita tentang Papua, yang disuarakan oleh media arus utama, seorang fotografer bernama Albertus Vembrianto Waluya, menawarkan perspektif lain terkait kondisi masyarakat di Papua lewat foto esai jurnalistiknya. Salah satunya adalah lewat foto esai berjudul *Puzzle of Violence* yang telah dikerjakannya mulai dari tahun 2016 lalu hingga hari ini.

Fragmen dari foto-foto tersebut kerap dipublikasikan di media-media asing seperti VICE, Mongabay, dan dipamerkan di ajang pameran foto kaliber internasional *World Press Photo* pada 2019 lalu.

Lewat esai fotonya, Vembri memberikan tawaran tentang keadaan pengungsi di kabupaten Nduga, korban kekerasan aparaturnegara, dan eksploitasi sumber daya alam yang terjadi di Papua. Vembri melakukan apa yang disebut Gramsci dalam buku *Negara & Hegemoni* sebagai *counter the ruling class* lewat esai fotografinya.



Gambar 1.1 Foto karya Albertus Vembri Waluya salah satu pengungsi di Nduga yang dipamerkan di ajang World Press Photo 2019
(Sumber: Instagram/@vembriwaluyas)

Mengacu pada konsep *counter ruling class* yang dicetuskan Gramsci, upaya Vembri melakukan advokasi menggunakan foto adalah suatu bentuk kontrawacana terhadap wacana dominan yang—di kasus Papua—dikendalikan oleh Negara lewat media arus utama seperti *Kompas* dan *TvOne*. Menurut Gramsci, Vembri merupakan *agent of change* dan dikategorikan sebagai ‘intelektual tradisional’. Adapun prasyarat ‘intelektual tradisional’ adalah subjek yang otonom dan merdeka dan berada di luar kelompok dominan. Ia berdiri independen, mengadvokasi masyarakat marjinal dan berjarak dengan kelompok utama, yaitu Negara. (Patria&Arief, 161-163 : 2015)

Selain Vembri ada banyak pewarta foto yang memotret isu-isu di Papua, sayangnya banyaknya pewarta foto yang memotret Papua tidak memiliki konsistensi yang panjang, selayaknya pewarta mereka hanya memotret beberapa isu besarnya saja. Salah satu pewarta foto yang memotret Papua adalah Beawiharta, ia adalah salah satu pewarta foto dari Reuters dan EPA. Projek foto terakhir Beawiharta adalah peliputan kerusuhan di Fakfak pada tahun 2019 silam. Foto foto dari Beawiharta yang terbit di berbagai media hanya memotret kerusuhannya saja. Berbeda dengan Vembri yang memotret Papua untuk dijadikan suatu projek yang panjang sampai hari ini. Dan Vembri menggunakan fotonya sebagai alat untuk meng-advokasi kawan-kawan di Papua yang mengalami kekerasan fisik maupun struktural.

Sementara, potret hubungan antara Negara dan Papua di media arus utama cenderung digambarkan sebagai relasi yang ‘adem ayem’. Seperti yang peneliti lansir dari *Kompas*, misalnya. Pasca ketegangan dan gelombang

demonstrasi besar-besaran yang terjadi di tanah Papua yang merespon tindak rasisme aparat dan masyarakat terhadap mahasiswa Papua pada akhir September 2019 lalu, portal berita arus utama dan sikap pemerintah cenderung permisif terhadap tragedi tersebut. Mayoritas, membuat *headline* pernyataan presiden Joko Widodo yang menghimbau masyarakat agar memaafkan tragedi rasisme tersebut. Alih-alih meminta maaf, menurut peneliti, pemerintah justru seolah turut melegitimasi kekerasan yang menimpa mahasiswa Papua, tanpa mengusut tuntas pelakunya hingga hari ini.

Jokowi: Mari Jaga Tanah Papua Tetap Damai

CNN Indonesia | Kamis, 29/08/2019 20:29 WIB

Bagikan :  



Gambar 1.2 salah satu contoh *headline* berita yang berisi himbauan presiden Joko Widodo di cnn.com
(Sumber: cnn.com)

Foto sebagai medium advokasi memang kerap dilakukan untuk merespon beberapa fenomena konflik sosial. Salah satu contohnya adalah foto esai karya Lewis W. Hine dan Jacob Riis di tahun 1880-an. Di tahun itu, kedua fotografer tersebut merekam kondisi buruh dan perbudakan yang terjadi di Amerika Serikat, khususnya di kota Manhattan. Saat foto tersebut terbit di sebuah surat kabar, dan sampai kepada masyarakat, foto tersebut mendorong gelombang demonstrasi besar-besaran yang menuntut revolusi sistem kerja terhadap korporasi-korporasi eksploitatif di Amerika Serikat. Foto itu adalah esai foto pertama yang merekam eksploitasi pekerja di dunia untuk pertama kalinya. (Wijaya, 2018:xv)

Menurut peneliti, hal tersebut tampak di karya-karya foto Vembri. Dalam foto yang digunakan sebagai medium advokasi, Vembri tidak hanya mempertimbangkan aspek formal-estetis dari sebuah foto. Melainkan, ia menggunakan foto sebagai medium distribusi wacana. Ia menggunakan dunia empirik sebagai acuan dalam kekaryanya. Sekaligus, menurut peneliti, foto-foto dari Vembri dimaksudkan untuk membuka ruang pemaknaan dari audiensnya tentang kondisi di Papua yang luput dari pemberitaan media massa arus utama.



Gambar 1.3 Foto karya Albertus Vembri Waluya tentang isu rasial yang dinominasikan di World Press Photo (Sumber: Instagram/@vembriwaluyas)

Bagi Stuart Hall ada dua representasi. *Pertama*, representasi mental yaitu konsep tentang “sesuatu” yang ada di kepala kita masing-masing (peta konseptual). Representasi mental ini masih berbentuk sesuatu yang abstrak. *Kedua* “Bahasa” yang berperan penting dalam proses konstruksi makna. Konsep abstrak yang ada di kepala kita harus diterjemahkan kedalam bahasa yang lazim, sesuatu yang dapat menghubungkan konsep dan ide-ide kita tentang sesuatu dengan tanda dan simbol. Representasi menghubungkan antara konsep dalam benak kita dengan menggunakan bahasa yang memungkinkan kita untuk mengartikan benda, orang, kejadian yang nyata (real), dan dunia imajinasi dari objek, orang, benda, dan kejadian yang tidak nyata (fictional) (Hall, 1997:17).

Untuk dapat memahami dan memaknai sebuah foto dengan berbagai unsur dan komponennya, peneliti menggunakan metode semiotik karena foto sebenarnya dibangun dengan tanda. Semiotik foto dibangun dengan tanda semata-mata. Tanda-tanda itu termasuk berbagai sistem tanda yang bekerja sama dengan baik untuk mencapai sebuah efek yang diharapkan (Sobur, 2016:128). Menurut Peirce, sebuah analisis tentang esensi tanda mengarah pada pembuktian bahwa setiap tanda ditentukan oleh objeknya. *Pertama*, dengan mengikuti sifat objeknya, ketika kita menyebutkan tanda sebuah ikon. *Kedua*, menjadi kenyataan dan keberadaannya berkaitan dengan objek individual, ketika kita menyebutkan tanda sebuah indeks. *Ketiga*, kurang lebih, perkiraan yang pasti bahwa hal itu diinterpretasikan sebagai objek denotatif sebagai akibat dari suatu kebiasaan ketika kita menyebut sebuah simbol (Sobur, 2016:35).

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif yang bertujuan untuk menjelaskan fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya pula (Kriyantono, 2015:56). Penelitian ini menggunakan cara berpikir induktif, yang berangkat dari hal-hal yang khusus (fakta empiris) menuju hal-hal yang umum (tataran konsep) (Kriyantono, 2015:196). Jenis penelitian ini adalah penelitian eksploratif yang bertujuan menggali data tanpa mengoperasionalkan konsep atau menguji konsep pada realitas yang diteliti, riset ini paling sederhana dan mendasar (biasanya kualitatif) (Kriyantono, 2015:68).

Dalam penelitian ini menggunakan metode analisis semiotika Charles Sanders Peirce. Semiotika ini mempelajari sistem-sistem, 11 aturan-aturan, konvensi-konvensi yang memungkinkan tanda-tanda tersebut mempunyai arti. Teori Peirce menjelaskan bahwa sesuatu itu dapat disebut sebagai tanda jika ia mewakili sesuatu yang lain. Tanda yang mewakilinya disebut *representamen (referent)*. Jadi apabila sebuah tanda mewakilinya, hak ini adalah fungsi utama tanda. Misalnya, anggukan kepala mewakili persetujuan, gelengan mewakili ketidaksetujuan.

Penelitian serupa pernah dilakukan oleh Fitriana mahasiswa Institut Seni Indonesia (Jogjakarta) pada tahun 2018 silam dengan judul *Representasi Kekerasan Simbolik Dalam Foto Iklan: Studi Kasus Foto Iklan Cetak Produk Kecantikan Perempuan dalam Majalah Femina tahun 2008*. Selain itu, penelitian dengan objek Stereotype terhadap suku Papua dan menggunakan metodologi semiotik yang sama juga pernah diteliti oleh mahasiswa Universitas Muhamaddyah Surakarta bernama Gabriella Hemas Sabatini dengan judul REPRESENTASI STEREOTYPE TERHADAP SUKU PAPUA KOROWAI (Analisis Semiotika tentang Representasi Stereotype Terhadap Suku Papua Korowai dalam Film Lost In Papua)

I.2 Rumusan Masalah

Bagaimana kekerasan masyarakat Papua direpresentasikan dalam karya foto Albertus Vembrianto yang berjudul *Puzzle of Violence*?

I.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah peneliti paparkan di atas. Peneliti ingin mengetahui bagaimana kekerasan masyarakat Papua direpresentasikan dalam karya foto esai Albertus Vembri Waluyas yang berjudul *Puzzle of Violence*?

I.4 Batasan Masalah

Subjek penelitian ini adalah karya esai foto Albertus Vembri Waluyas yang berjudul *Puzzle of Violence*. Objek dari penelitian ini adalah kekerasan yang dialami oleh masyarakat Papua.

I.5 Manfaat Penelitian

I.5.1 Manfaat Akademis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi kajian ilmu komunikasi, di bidang kajian semiotika dan film dalam media massa khususnya dalam fotografi mengenai representasi masyarakat Papua dengan pendekatan Peirce.

I.5.2 Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai referensi tambahan dan sebagai sarana pembelajaran terhadap representasi masyarakat Papua dengan pendekatan Peirce.